

ABSTRAK

Kepentingan nasional merupakan kunci yang mendasar dalam memahami hubungan internasional, khususnya dalam menjalankan kedaulatan negara, diplomasi, dan politik luar negeri. Kasus penangkapan dan penahanan anak-anak Indonesia di laut territorial Australia membuktikan bahwa Australia dan Indonesia memiliki kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk menjalankan yurisdiksi dan mengadakan tindakan personalitas internasional sepenuhnya. Australia dalam menjaga wilayahnya menerapkan yurisdiksi teritorial untuk membuat undang-undang dan mengadili mereka yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Indonesia dalam melindungi warga negaranya, menjalankan yurisdiksi personal untuk memberikan bantuan bagi warga negara Indonesia yang sedang terjerat kasus hukum. Permasalahan ini diteliti menggunakan metode *yuridis normatif* dengan mengacu pada hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, untuk melukiskan suatu keadaan yang dikaitkan dengan teori dan/atau peraturan hukum internasional. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode *analisis kualitatif*. Laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Australia yang berjudul “*An Age of Uncertainty*” menjelaskan bahwa dalam menjalankan kedaulatannya Australia telah melakukan kesalahan dengan menangkap, menahan, dan memperlakukan anak-anak Indonesia selayaknya orang dewasa. Indonesia dan Australia bekerja sama melalui mekanisme *Police to Police* mengumpulkan bukti dokumen sebagai bahan identifikasi umur anak-anak tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, anak-anak Indonesia pun melayangkan gugatan atas Pemerintah Australia dan menuntut ganti rugi.

Kata kunci :pertanggungjawaban Indonesia, penangkapan anak, laut teritorial Australia

ABSTRACT

National interests are a fundamental key in understanding international relations, especially in carrying out state sovereignty, diplomacy and foreign policy. The cases of arrest and detention of Indonesian children in the Australian territorial sea prove that Australia and Indonesia have legal capacity to carry out jurisdiction and carry out acts of international personality completely. Australia in maintaining its territory applies territorial jurisdiction to make laws and prosecute those who violate them. Indonesia in protecting its citizens, carries out personal jurisdiction to provide assistance to Indonesian citizens who are caught in legal cases. This problem was examined using normative juridical methods with reference to law, legislation and library materials. The research specifications used was descriptive analytics, to describe a situation that is associated with the theory and / or regulations of international law. The data used were secondary data obtained from library materials, primary, secondary, and tertiary legal materials. Processing and analysis of data using qualitative analysis methods. The report from the Australian National Human Rights Commission entitled "An Age of Uncertainty" explained that in carrying out its sovereignty Australia had made a mistake by arresting, detaining and treating Indonesian children as adults. Indonesia and Australia work together through the Police to Police mechanism to collect documentary evidence as material for identifying the age of these children. Do not stop there, Indonesian children also filed suit against the Australian Government and demanded compensation.

Keywords: Indonesian responsibility, child arrest, Australian teritorial sea